PONTIANAK POST

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	2025	Hal.: 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Harisson Tegaskan Perkuat Tata Kelola Lingkungan

PONTIANAK - Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson menegaskan, isu lingkungan hidup saat ini menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah. Ia menyebut tantangan pengelolaan semakin kompleks, mulai dari alih fungsi lahan, pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, hingga pemanfaatan sumber daya alam.

"Karena itu, hasil pemeriksaan ini akan menjadi cermin untuk memperbaiki sekaligus memperkuat kebijakan yang lebih berpihak pada kelestarian lingkungan," kata Harisson saat memimpin rapat Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat di Ruang Rapat Tengkawang, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (25/8/2025).

Rapat dihadiri jajaran auditor BPK RI Perwakilan Kalbar serta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalbar. Pertemuan ini menjadi langkah awal pelaksanaan pemeriksaan tematik terkait lingkungan hidup yang akan berlangsung selama 20 hari, mulai 25 Agustus hingga 19 September 2025.

Pemeriksaan kepatuhan pendahuluan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini akan difokuskan pada enam OPD, yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Kalbar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalbar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalbar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kalbar.

◆Ke Halaman 11 kolom 1

Harisson, menilai pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola lingkungan hidup di daerah.

Ia menekankan, proses ini sejalan dengan upaya membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, sekaligus berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Kalbar menyambut baik pemeriksaan ini dan mendukung penuh agar pelaksanaannya berjalan lancar," ujar Harisson.

Ia juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk bersikap terbuka, menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, serta aktif berkoordinasi dengan tim pemeriksa. Menurutnya, pemeriksaan ini bukan beban, melainkan kesempatan memperbaiki kinerja dan menutup kelemahan dalam pelayanan publik.

"Saya minta OPD menyiapkan data secara lengkap dan terbuka. Jadikan pemeriksaan ini peluang untuk meningkatkan kualitas kerja dan memastikan pelayanan kepada masyarakat semakin baik," tegasnya.

Harisson berharap hasil pemeriksaan nantinya memberi rekomendasi yang bisa memperkuat kebijakan pemerintah daerah. "Kami yakin akan ada masukan yang membangun dan membantu merumuskan program yang lebih efektif, terutama untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Barat," tutupnya.

Sementara itu dari BPK RI Perwakilan Kalbar, Ganesa Kusbandana, selaku Pengendali Teknis Tim Pemeriksa menjelaskan bahwa tujuan pemeriksaan bukanlah untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Pemeriksaan ini kami lakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan dan program yang dilaksanakan pemerintah daerah benar-benar mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup. Sehingga kinerja pemerintah daerah semakin baik dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat," ujarnya.

Ganesa juga berharap adanya kerja sama penuh dari OPD yang menjadi objek pemeriksaan.

"Kami berharap semua pihak yang terkait dapat bersinergi, kooperatif, dan transparan. Dengan begitu, hasil pemeriksaan bisa lebih komprehensif, obyektif, serta memberikan nilai tambah bagi peningkatan tata kelola pemerintahan daerah," tutupnya. ***(mse)***